POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2019 DALAM MEWUJUDKAN VISI MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

ROBIATUL ADAWIYAH
07041181621174

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2019 DALAM MEWUJUDKAN VISI MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

SKRIPSI

Disusun oleh :

ROBIATUL ADAWIYAH

07041181621174

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 26 Februari 2021

Pembimbing I

Dr. Zulfikri Suleman, M.A
NIP. 195907201985031002

Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A
NIP. 199208272019031005

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2019 DALAM MEWUJUDKAN VISI MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 09 April 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman, M.A
Ketua

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
Anggota

Dra. Retno Susilowati, MM.
Anggota

Abdul Halim, S.I.P., M.A.
Anggota

Indralaya, 28 Mei 2021
Mengesahkan,
Dekan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robiatul Adawiyah

NIM : 07041181621174

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019 Dalam *Mewujudkan Visi Menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*" *ini adalah* benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan / atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, maka saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 26 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

Robiatul Adawiyah

NIM. 07041181621174

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

.... Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah 94 : 5-8)

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu"

(QS. Al-Baqarah 2 :45)

"Kekuatan hati akan teruji jika kita dihadapkan pada sebuah kesulitan. Hadapi dan syukurilah, karena masalah akan membuatmu dewasa"

(Penulis)

"Orang sabar akan menemukan jalan keluar"

(Penulis)

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ♥ *Alm Ayahandaku tercinta (Abunawar Kgs. A. Rozak)*
- ♥ *Ibundaku tercinta (Rosmala Dewi)*
- ♥ *Saudara-saudaraku*
- ♥ *Teman-teman seperjuanganku HI Unsri Angkatan 2016*
- ♥ *Almamaterku*
- ♥ *Masa depanku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Politik Luar Negeri Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019 dalam Mewujudkan Visi Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia"**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kgs, Muhammad Sobri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak dan Ibu di bagian Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Ferdiansyah R, S.IP., MA selaku Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah.
6. Dr. Zulfikri Suleman, M.A selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Des Alwi Mantan Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Roma 2015-2017, yang telah memberikan waktu dan kesediannya untuk di wawancarai guna menjawab pertanyaan tentang skripsi yang sedang penulis kerjakan.
9. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Mbak Siska dan Kak Dimas, selaku Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu penulis dalam mengurus akademik mahasiswa, sehingga berjalan dengan lancar.
11. Reggy Nur Muhammad, Irma Setiani, Riandy Hermawan, Nur Annida Mahdiya, Selvi Adrianti, Hanifah Khairunisah, Dian Ayu, Muammar Hafiizh, Zainal Prima Putra dan Heniati sebagai sahabat yang telah membantuku dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. M. Yamin, M. Nopriyansyah, M. Yunus Nusantara dan M. Arief Hidayat yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar WAKI (Wahana Kerohanian Islam) FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membentuk penulis sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi.
14. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016.

Indralaya, 26 Februari 2021

Robiatul Adawiyah
07041181621174

ABSTRAK

Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan cita-cita ambisius pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019. Topik ini, yang akan dibahas dalam penelitian ini, merupakan pelaksanaan dari program kampanyenya dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia di masa periode pertama (2014-2019) pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan fokus pada implementasi gagasan 'Indonesia sebagai poros maritim dunia'. Lebih spesifiknya, penelitian ini berfokus pada diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia secara bilateral dan multilateral. Konsep 'kerja sama internasional' *(international cooperation)*, 'politik luar negeri' (*foreign policy*) dan 'kepentingan nasional' (*national interests*) digunakan untuk menggambarkan secara jelas upaya mewujudkan visi Indonesia tentang poros maritim dunia. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk data sekunder dari buku-buku terkait, jurnal, surat kabar dan internet kemudian dianalisis secara kualitatif. Juga diadakan sekali wawancara dengan seorang mantan diplomat Indonesia yang kompeten dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pada awalnya Indonesia memiliki niat yang kuat untuk melaksanakan program kemaritiman dengan melakukan persiapan kelembagaan dan hukum. Namun, impian Indonesia menjadi poros maritim dunia masih belum terwujud sepenuhnya. Indonesia tentunya telah berpartisipasi dalam beberapa perjanjian bilateral dan multilateral terkait masalah maritim ini. Sebaliknya Indonesia juga mengalami beberapa kendala, baik secara internal (manajerial dan operasional) maupun eksternal (respon negatif dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand). Pada masa jabatan keduanya (2019-2024), pemeritahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin harus menunjukkan upaya diplomasi yang lebih kreatif dan kuat untuk mewujudkan impian Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi kenyataan.

Kata-kata kunci: politik luar negeri, poros maritim dunia, kepentingan nasional, diplomasi maritim, kerja sama internasional, tantangan.

Dosen Pembimbing I

Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
NIP. 195907201985031002

Dosen Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005

Palembang, 1 Mei 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan International
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

Indonesia as the pivot of world maritime is an ambitious ideal of the Joko Widodo government, 2014-2019. This topic, which will be discussed in this research as a continuation of his election campaign programme during the presidential election in 2014 is importantly taken into consideration. This research is intended to analyze Indonesia's foreign policy during his first term of office (2014-2019) the President Joko Widodo government with a focus on the implementation of the idea of 'Indonesia as the pivot of world maritime'. More spesifically, this reseach focuses on maritime diplomacy Indonesia carry on on bilateral and multilateral. The concepts of 'international cooperation', 'foreign policy' and 'national interests are used to clearly describe the effort to realize the Indonesian vision of the pivot of world maritime. The data for this research were collected in the form of secondary data, from relevant books, journals, newspapers and internet and then are analyzed qualitatively. One interview is also done with an ex-Indonesian competent diplomat from the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. The result of data analysis show that is found that Indonesia has initially strong intention to implement the maritime programme with making institutional and legal preparations. However, Indonesia's dream of becoming the pivot of world maritime has not yet been completely implemented. Indonesia has certainly participated in some multilateral, trilateral and bilateral agreements concerning this maritime issues. On the contrary, Indonesia also encountered some obstacles, internally (in managerial and operational terms) and externally (negative responses from neigboring countries like Malaysia and Thailand). During his second term of office (2019-2024), the President Joko Widodo and vice President Ma'aruf Amin government must show its more creative and stronger diplomatic efforts to make his dream of Indonesia as the pivot of world maritime into reality.

Keywords: foreign policy, pivot of world maritime, national interests, maritime diplomacy, international cooperation, obstacles.

Advisor I

Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
NIP. 195907201985031002

Advisor II

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005

Palembang, 1 Mei 2021
Head of Department of International Relations Science
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR SINGKATAN xiv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Tinjauan Pustaka 8

1.6 Landasan Konseptual 12

1.6.1 Kerangka Konsep 12

1.6.2 Alur Pemikiran 16

1.7 Hipotesis/ Argumen Utama 16

1.8 Metode Penelitian 17

1.8.1 Desain penelitian 17

1.8.2 Definisi Konsep 18

1.8.3 Fokus Penelitian 19

1.8.4 Unit Analisis 22

1.8.5 Jenis dan Sumber Data 22

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 23

1.8.7 Teknik Keabsahan Data 24

1.8.8 Teknik Analisis Data 24
1.8.9 Jadwal Penelitian 26

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN 27

2.1 Profil Presiden Joko Widodo…..... 28
2.2 Program Nawacita …….....……..... 30
2.3 Visi Poros Maritim Dunia …..... 32
2.4 Landasan Visi Poros Maritim Dunia ……....……...…...…….. 34

BAB III PEMBAHASAN ……..... 37

3.1 Dasar dan Kebijakan Politik Luar Negeri ……....……..... 38
3.2 Pelaksanaan dan Hasil Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia 44
3.2.1 Pilar Diplomasi Maritim 44
3.3 Tantangan Indonesia dalam Mewujudkan Visi Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ……....…….....……..…. 57

BAB IV PENUTUP 73

4.1 Kesimpulan 73
4.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tingkatan Konsumsi Ikan Indonesia dan negara lain 2

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu 8

Tabel 1.3.Tabel Fokus Penelitian 19

Tabel 1.4. Tabel Rencana Jadwal Penelitian 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 28

Gambar 1.2 Peta Jalan Kebijakan Kelautan Indonesia 43

Gambar 1.3 Negara Anggota IORA dan Negara Mitra Dialog IORA 50

DAFTAR SINGKATAN

AIC	: Australia Indonesia Center
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
BAKORKAMLA	: Badan Koordinasi Keamanan Laut
BPN	: Badan Pertahanan Nasional
CTI-CFF	: Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food
DKP	: Departemen Kelautan dan Perikanan
ICRI	: International Coral Reef Initiative
IMO	: International Maritime Organization
ISBA	: Internasional Sea Bed Authority
ISPS	: International Ship and Port Facility Security
IORA	: Indian Ocean Rim Association
IOR-ARC	: Indian Ocean Rim Association for Regional Association
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KTT	: Konferensi Tingkat tinggi
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MCC	: Maritime Command Center
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERPRES	: Peraturan Presiden
PLNRI	: Politik Luar Negeri Republik Indonesia
PMD	: Poros Maritim Dunia

PTM	: Pertemuan Tingkat Menteri
RFMO	: Regional Fisheries Management Organization
RI	: Republik Indonesia
RPJMN	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAR	: Search and Rescue
SLC	: Sea Lane Corridor
TMPI	: Trilateral Maritime Patrol Indomalphi
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
WOC	: Word Ocean Conference
ZEE	: Zona Ekonomi Ekslusif

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jakarta Concord

Lampiran 2 Joint Declaration Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of Indonesia-Malaysia-Philippines

Lampiran 3 Joint Statement Trilateral Meeting Among The Defence Of The Philippines, Malaysia and Indonesia

Lampiran 4 Diskusi via *WhatsApp* dengan Des Alwi Mantan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Roma Tahun 2015-2017 untuk meminta waktu dan kesediaannya di wawancarai melalui via telpon

Lampiran 5 Hasil wawancara dengan Des Alwi Mantan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Roma Tahun 2015-2017

Lampiran 6 SK Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 7 Kartu Pembimbingan Skripsi Pembimbing 1 Sebelum dan Setelah Seminar Proposal

Lampiran 8 Kartu Pembimbingan Skripsi Pembimbing 2 Sebelum dan Setelah Seminar Proposal

Lampiran 9 Tabel Revisi Hasil Seminar Proposal

Lampiran 10 Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia mempunyai lebih kurang 17.499 pulau dengan garis pantai yang mencapai ribuan kilometer yang terbentang di bagian Barat pada Sabang hingga Bagian Timur pada Merauke, mengakibatkan Indonesia menjadi negara kepulauan serta negara maritim terbesar di dunia. Sementara itu, Letak Indonesia berada di antara dua Benua serta dua Samudera yaitu Benua Asia dan Australia, dan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, mengakibatkan posisi geografis Indonesia menjadi sangat strategis di jalur perairan dunia karena terhubungnya antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik (Pramono, 2016, h. 18). Posisi Indonesia yang menjadi titik tumpu perhubungan tersebut, membuat Indonesia selalu berada di bawah medan pengaruh kekuatan dunia yang saling berinteraksi. Keadaan ini tentunya secara otomatis memberi dampak serta mempengaruhi dinamika dikehidupan nasional kita baik dibidang politik, ekonomi dan budaya bangsa.

Di samping itu, wilayah laut yang dimiliki Indonesia dengan luas sekitar 3.544.743,9 km^2 menyimpan kekayaan laut yang melimpah dan mempunyai potensi sumber daya ekonomi yang begitu besar sehingga bisa dipergunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pramono, 2016, h. 18). Akan tetapi orientasi pembangunan nasional di Indonesia pada dimensi kelautan belum dikelola secara maksimal karena selama ini pembangunan nasional di Indonesia lebih menekankan pada aspek berbasis wilayah daratan (Maiwan, 2017).

Selain itu juga potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan baik di perairan tawar, payau dan laut relatif tinggi, namun makan ikan pada sebagian besar Indonesia belum menjadi budaya. Hal ini bisa dilihat dari tingkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia yang tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang jauh lebih kecil daripada Indonesia seperti Malaysia, Korea Selatan dan Jepang.

Tabel 1.1 Tingkatan Konsumsi Ikan Indonesia dan negara lain

No.	Negara	Konsumsi Ikan
1.	Indonesia	50,12 kg/kap/th
2.	Malaysia	70 kg/kap/th
3.	Korea Selatan	80 kg/kap/th
4.	Jepang	140 kg/kap/th

Sumber :Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 11 (1) hal. 12

Dengan pernyataan di atas, maka pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dimulai dari tahun 2014 merancang program prioritas yang dikenal dengan sebutan *Nawacita*, yaitu Sembilan harapan atau agenda prioritas yang akan dijadikan program utama atau tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan Presiden Jokowi. Di dalam Sembilan butir program *Nawacita* tersebut, butir pertama dan keenam merupakan tentang politik luar negeri yaitu yang isinya (Martini, 2015, Hal. 34) :

Butir pertama program *Nawacita* adalah

> "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan membangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim".

Butir keenam program *Nawacita* adalah

> “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.

Salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam butir pertama program *Nawacita* tentang politik luar negeri tersebut adalah bertujuan menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia (PMD), sehingga memperkuat jati diri sebagai negara maritim, serta bertujuan menjadikan Indonesia bangsa maritim yang besar, kuat, dan makmur (Kominfo, 2016). Menurut Jamaluddin selaku Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makasar, terdapat tujuh alasan pentingnya visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Pertama,* Indonesia adalah negara maritim dan pemberian Tuhan kepada bangsa Indonesia. Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di Bumi saat peristiwa Coral Triangel di Manado. *Kedua*, karena tidak ada negara kepulauan yang memiliki pulau sebanyak Indonesia, yaitu 17.000 pulau. Ia juga menambahkan, "Panjang pantai yang bisa dimanfaatkan itu hanya Indonesia yang bisa melakukannya". *Ketiga,* potensi pangan dari sektor perikanan. Ia menjelaskan, umat manusia akan menghadapi masalah krisis pangan dunia. Namun jika dikelola dengan baik, potensi produksi Indonesia bisa mencapai 60 juta ton per tahun, bahkan Indonesia bisa menyuplai ke dunia. *Keempat,* Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut Indonesia adalah pasar tersendiri. Jamaluddin menambahkan. "Masalah maritim ini harus diselesaikan. mengingat penduduk Indonesia yang banyak menjadikan Indonesia adalah pasar yang sangat bagus". *Kelima,* posisi strategis Indonesia, karena diapit oleh dua samudra dan dua benua. Jika ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, sangat memungkinkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Keenam,*

adalah potensi energi dan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. “Seharusnya kita tidak mengalami krisis energi. Harapannya ada sistem yang terstruktur untuk mengelola energi baru dan terbarukan di masa depan. *Ketujuh*, menurut Jamaluddin adalah jasa lingkungan laut. Bio teknologi dan bio prospektif sedang menurun di darat. Karenanya, kekayaan biota laut Indonesia menjadi pilihan alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Mengenai hal tersebut, maka untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia diperlukan adanya kebijakan politik luar negeri yang jelas serta terarah dan berorientasi pada kemaritiman

Visi Poros Maritim Dunia (PMD) tersebut diungkapkan Presiden Jokowi pada pidato di forum pertemuan G-20, KTT ASEAN dan Asia Timur pada tahun 2014 (Siliwangi Raden, 2015, h. 22). Dalam pidatonya Presiden Jokowi menegaskan bahwa dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden Joko Widodo menyusun lima pilar utama guna mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia (Kominfo, 2016). Kelima pilar tersebut adalah :

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut
3. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim
4. Diplomasi maritim
5. Membentuk kekuatan pertahanan maritim

Setelah dua tahun kelima pilar tersebut, dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Peraturan Presiden tersebut menguraikan lima pilar sebelumnya menjadi tujuh pilar kebijakan kelautan. Ketujuh pilar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia
2. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut

3. Tata kelola dan kelembagan laut
4. Ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan
5. Pengelolaan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut
6. Budaya bahari
7. Diplomasi maritim (Kebijakan Kelautan Indonesia, 2017)

Diplomasi maritim merupakan salah satu pilar yang di kedepankan pada perwujudan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) di era pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2019.

Diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan internasional melalui domain kelautan (Indrawati, 2016). Diplomasi maritim berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dengan menyelesaikan masalah-masalah di laut, karena sampai dengan saat ini wilayah laut khususnya di Indonesia masih rentan terhadap berbagai bentuk ancaman maritim. Oleh karena itu diplomasi maritim Indonesia dibangun dengan kepercayaan antar negara-negara (Indrawati, 2016). Melalui diplomasi maritim Indonesia mengedepankan upaya bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanan maritim.hal itu bisa dilihat pada pidato yang dikemukakan Presiden Joko Widodo di EAS ke-9, yang isi pidatonya adalah sebagai berikut :

> “Melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim ini. Kita harus bekerja sama untuk menghilangkan akar penyebab konflik di laut, seperti *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, pembajakan, dan pencemaran laut. Lautan harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua” (Rijal, n.d.).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diplomasi maritim merupakan pilar yang menjadi ujung tombak dalam perwujudan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Alasan penulis memilih tema ini terutama karena kajian mengenai Politik Luar Negeri sangat menarik dan membutuhkan penelitian yang lebih mandalam. Hal ini dikarenakan, penulis melihat bahwa kajian Politik Luar Negeri pada disiplin Ilmu Hubungan Internasional sangat penting di masa mendatang khususnya di Indonesia dan penulis juga tertarik untuk membahas tentang visi yang diprioritaskan oleh Presiden Joko

Widodo pada masa pemerintahanya yaitu dalam hal mewujudkan visi menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia (PMD), dikarenakan bahasannya selain berkaitan dengan keamanan maritim sejalan dengan konsentrasi yang penulis ambil selama mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional yaitu konsentrasi Kajian Strategi dan Keamanan Internasional juga mencakup hal lain didalamnya, sehingga penulis bisa mempelajari hal yang baru selain terdapat di dalam konsentrasi yang penulis ambil selama di bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **"Politik Luar Negeri Indonesiadi Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019 dalam Mewujudkan Visi Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia"**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019 dalam Mewujudkan Visi Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?".

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia khususnya dalam pilar diplomasi maritim.

2. Untuk memahami politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia khususnya dalam pilar diplomasi maritim.

1.3.2 Tujuan Subjektif

1. Untuk menyelesaikan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Sriwijaya.
2. Untuk memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmiah bidang hubungan internasional.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman di kajian Studi Ilmu Hubungan Internasional yang berkenaan dengan politik luar negeri Indonesia khususnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi kepada pembaca tentang politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, serta dapat dijadikan sumber bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Sriwijaya khususnya pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Adapun penelitian sebelumnya yang mempunyai ruang lingkup serta topik penelitian yang sejalan dengan judul penelitian yang akan dibahas, berupa buku, jurnal, serta laporan penelitian. Sebagai landasan teoritis serta konseptual yang relevan dalam memecahkan masalah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu bisa dilihat di tabel bawah ini sebagai berikut.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Mochdar Soleman & Mohammad Noer
	Judul	Nawacita Sebagai Strategi Khusus jokowi Periode Oktober 2014 – 20 Oktober 2015
	Nama Jurnal	Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 13 No. 1. Hal 1-15
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Terkait pembahasan kegiatan pemerintahan, Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi mencanangkan Nawacita yang bertujuan menerapkan strategi khusus untuk memperkuat politik pemerintahan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan pengusaha, yaitu melalui ketentuan pemerintah tentang "Undang-Undang Pengupahan" agar pemerintah dapat menjaga kedaulatan politik secara seimbang. Selain itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi dapat dilakukan dengan memberi ruang yang cukup kepada investor, memperkuat tenaga kerja Indonesia atau TKI, dan mengembangkan industrialisasi bersifat kompetitif agar dapat bersaing di dalam negeri Indonesia. Akhirnya dalam tatanan dunia baru, kebijakan “Peraturan

		Pengupahan Pemerintah" memberi kepastian serta peluang pada para pelaku investasi guna didirikannya industri di negara Indonesia lewat pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan dalam ideologi, kebijakan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditunjukkan dengan menganut sistem ekonomi liberal.
	Perbandingan	Penelitian ini membahas bahwa pada saat melaksanakan roda pemerintahannya, Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi mencanangkan program yang dikenal dengan nama *Nawacita*. Program *Nawacita* ini termasuk gagasan strategi khusus dari gagasan Trisakti Soekarno. Namun, dalam ideologi kebijakan pemerintah Jokowi ditunjukkan dengan menganut sistem ekonomi liberal. Perbandingan kajian berbeda dengan penelitian penulis terletak pada, di jurnal ini membahas prioritas 9 (sembilan) program utama *Nawacita*. Sedangkan penelitian penulis hanya membahas tentang salah satu kebijakan politik luar negeri yang berdasarkan visi *Nawacita* pada butir pertama dari Nawacita tersebut yaitu dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
2	Nama Penulis	Rizky Alif Alvian, Ganesh Cintika Putri, Irfan Ardhani
	Judul	Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia : Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo
	Nama Jurnal	Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 2. Hal 151-165
	Tahun	2017

	Hasil Penelitian	Membahas mengenai peralihan strategi diplomatik Indonesia dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan batas maritim dan demokrasi, isu Islam dan HAM (HAM), memperlihatkan bahwasanya strategi Indonesia sedang berubah. Di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono, ia berusaha memperkuat kekuasaan Indonesia dengan membentuk sikap hegemonik terhadap warga internasional yang baik dalam politik internasional. Dalam pemerintahan Yudhoyono, Indonesia mengikuti kaidah-kaidah utama tatanan politik dan ekonomi liberal tentang perilaku kenegaraan. Selama pemerintahan Jokowi, Indonesia telah mengadopsi pendekatan berbeda. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginspirasi Indonesia guna mengambil tindakan yang tegas pada politik internasional. Di berbagai peluang, Indonesia berusaha menunjukkan harapannya untuk menjaga jarak dengan kekuatan yang lebih ditonjolkan pada politik internasional serta regional guna rangka menegakkan kedaulatannya terutama di bidang maritim guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
	Perbandingan	Penelitian ini membahas transformasi strategi diplomasi Indonesia sebagai negara *'middle power'* dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perbandingan kajian berbeda terletak pada objek penelitian dan teori / konsep yang digunakan. Pada jurnal ini, objek

		penelitiannya adalah perbandingan diplomasi ‘Middle Power’ pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan teori / konsep yang digunakan pada jurnal tersebut adalah teori / konsep *relational power* serta *meta-power*. Sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya adalah hanya politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019 dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Konsep yang digunakan penulis dalam bahasan ini adalah konsep Politik Luar Negeri serta Kepentingan Nasional.
3	Nama Penulis	Hasan Supriadi
	Judul	Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia
	Nama Jurnal	Jurnal Agregasi, Vol. 6 No. 2. Hal 139-148
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Membahas mengenai apa itu pemimpin dan kepemimpinan serta gaya kepemimpinan presiden Indonesia yaitu dari presiden Ir. Soekarno sampai dengan presiden sekarang, yaitu Joko Widodo. Kekuasaan dan kepemimpinan memiliki hubungan keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Menjadi pemimpin tidak hanya bergantung pada preferensi masing-masing, tetapi juga pada faktor-faktor lainnya terkait hal itu. Seorang pemimpin sukses diharus mempunyai berbagai kriteria berdasarkan pandangan maupun metode yang dipergunakan, baik kepribadian, keterampilan, bakat, kualitas maupun otoritasnya akan sangat mempengaruhi teori dan gaya

		kepemimpinan yang dianut.
	Perbandingan	Penelitian ini membahas mengenai gaya kepemimpinan Presiden Indonesia yaitu dari Presiden Ir. Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo. Perbandingan kajian terletak pada objek penelitian yaitu pada jurnal ini objek penelitiannya adalah gaya kepemimpinan Presiden Indonesia dari gaya Presiden Ir. Soekarno sampai Presiden Jokowi. Sedangkan pada penelitian ini objek kajiannya adalah politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

1.6 LANDASAN KONSEPTUAL

1.6.1. Kerangka Konsep

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Konsep Kerja Sama Internasional

Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional yang menjadi pendukung bagi penelitian. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara menjalin hubungan dengan negara lain untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Layaknya kerja sama internasional, suatu negara akan bekerja sama dengan negara lain yang diyakini akan menguntungkan negaranya. Menurut K.J Holsti (dalam Suryadi, 2015, h. 5), kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai satu atau lebih kepentingan, visi dan harapan yang sama yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya.

Sederhananya, kerja sama bisa dilakukan oleh dua atau lebih negara. Sederhananya, kerja sama bisa dilakukan oleh dua atau lebih negara. Kerjasama semacam ini dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral atau kerjasama antara kedua negara, kemudian ada kerjasama regional atau kerjasama antar negara tetangga, dan ada juga kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang lebih rumit karena banyak negara. terlibat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kerja sama internasional yang di dalamnya terdapat kerja sama bilateral yaitu kerja sama yang dilakukan oleh dua negara seperti kerjasama Indonesia dengan Australia dalam bentuk *Plan of Action on Maritime Cooperation, Indonesia dan Australia,* kerja sama Indonesia dan Jepang dalam bentuk *Japan and Indonesia Maritime Partnership,* dan kerja sama maritim Indonesia dengan Tiongkok dan mensinergikan antara kebijakan *one belt and one road* dan kebijakan Poros maritim dunia. Selain kerja sama bilateral dalam penelitian ini, ada pula kerja sama multilateral yaitu kerja sama yag dilakukan oleh dua negara atau lebih seperti kerja sama dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA), kerja sama dalam *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI), dan kerja sama dalam bentuk *International Coral Reef Initiative* (ICRI) mengenai terumbu karang.

b. Konsep Politik Luar Negeri

Penelitian ini menggunakan konsep politik luar negeri yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tentang Hubungan Diplomatik tahun 1999, yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah :

> "Kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional".

Menurut Modelski (dalam Bakry, 2017, h. 156) Politik luar negeri adalah sistem kegiatan di mana suatu negara mengubah perilaku internasionalnya serta mengatur kegiatannya sendiri di lingkungan internasional.

Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI) memiliki dua aspek yaitu memberikan dukungan bagi terwujudnya kepentingan nasional dan bekerja keras untuk berkontribusi kepada dunia internasional. Perkembangan situasi global yang terus berubah semakin meningkat. menghadapi berbagai tantangan. Selain persoalan yang kompleks dan multidimensi, munculnya isu-isu tradisional non-tradisional serta fenomena geopolitik dan geoekonomi regional dan global menjadi tantangan yang harus dihadapi dan dihadapi Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan politik luar negeri diabdikan untuk mencapai kepentingan nasional dan mengarah pada upaya memperoleh dan memperkuat kerja sama untuk mendapatkan patronasi dari negara lain serta lembaga internasional.

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 diimplementasikan guna tercapainya kepentingan nasional. Bidang kemaritiman merupakan salah satu kepentingan nasional yang harus diwujudkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan kemaritiman termasuk dalam agenda khusus yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti terlihat dari konsep Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, konsep tersebut menempatkan konsep kemaritiman dalam agenda pemerintahannya. (Indrawati, 2016).

c. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Penelitian ini juga menggunakan kosep kepentingan nasional sebagai pendukung bagi penelitian. Untuk merumuskan politik luar negeri Indonesia khususnya pada masa

pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tentunya berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, karena kepentingan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dan terkait dengan kebutuhan negara. Bagi Indonesia, kepentingan nasional secara umum sejalan dengan Pembukaan Pasal 4 UUD 1945, terutama yang menyangkut hubungan internasional yang disahkan oleh Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, konsep kepentingan nasional adalah konsep yang tepat guna menggambarkan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ahli hubungan internasional H. J. Morgenthau (H. J. Morgenthau) mengajukan beberapa definisi kepentingan nasional, seperti menyamakan kepentingan nasional sama dengan kekuatan yang akan dicapai suatu negara pada hubungan internasional. Dengan hal ini, menurut Morgenthau, hakikat kepentingan nasional merupakan kekuasaan (kekuatan, pengaruh serta kekuasaan). Namun, baik Joseph Frankel maupun Nicholas Spykman percaya bahwa kepentingan nasional bukan hanya merupakan bagian kekuasaan, akan tetapi meliputi juga kepentingan moral, agama, budaya dan lainnya, walaupun untuk mencapai tujuan tersebut unsur kekuasaan yang cukup tetap dibutuhkan (Bakry, 1999, p. 61).

Menurut Donald E. Nuechterlin (Bakry, 1999, p. 62) menuturkan bahwa paling sedikit terdapat empat (empat) macam jenis kepentingan nasional, antara lain :

1. Kepentingan pertahanan, termasuk kepentingan melindungi warga negara, wilayahnya, serta sistem politiknya dari ancaman negara lain;
2. Kepentingan ekonomi, kepentingan meningkatkan perekonomian nasional dengan melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain;
3. Kepentingan tata Internasional, yaitu perwujudan ataupun pemeliharaan kepentingan sistem politik serta ekonomi internasional yang bermanfaat untuk negara;
4. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan guna mempertahankan ataupun melindungi ideologi suatu negara dari berbagai ancaman ideologi negara lain.

Pada pemerintahan Joko Widodo, salah satu kepentingan Indonesia yang dituangkan dalam visi politik luar negerinya yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, serta makmur dengan mengembalikan jati diri Indonesia menjadi negara maritim, pengamanan kepentingan serta keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim guna mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia sehingga bisa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia

1.6.2. Alur Pemikiran

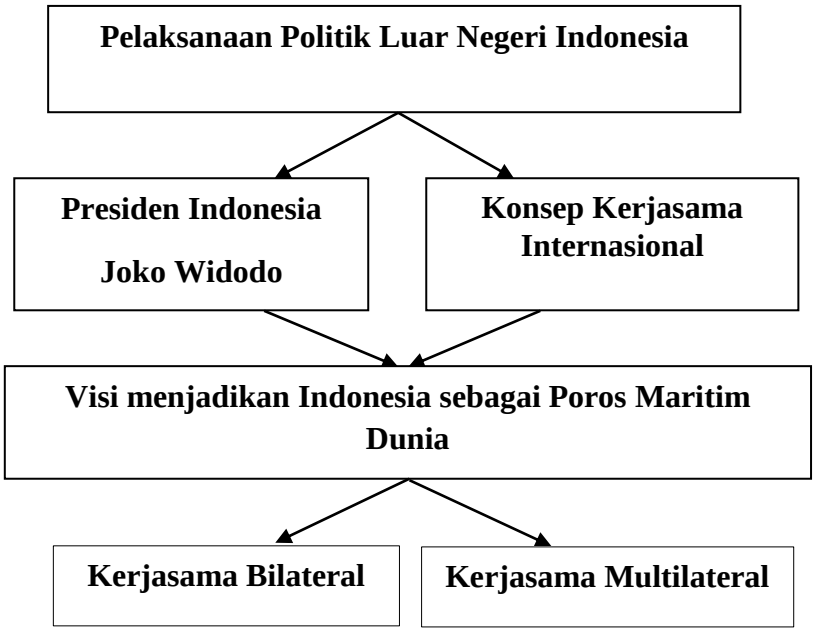

1.7 HIPOTESIS / ARGUMEN UTAMA

Politik luar negeri di era Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bertumpu pada diplomasi yang aktif dan kuat. Diplomasi maritim merupakan pilar yang di kedepankan dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Diplomasi maritim tersebut dilaksanakan dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral yang hasilnya berupa kesepakatan dan perjanjian

terkait kemaritiman. Dalam pelaksanaannya, diplomasi maritim menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal, tantangan internal berasal dari dalam negara berupa tumpang tindih antar kebijakan lembaga yang terkait dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sedangkan, tantangan eksternal berasal dari respon negatif dari negara tetangga terhadap kebijakan yang diterapkan pada saat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku *illegal fishing*.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian tugas akhir ini adalah deskriptif dan kualitatif Menurut Nurdin (2019, h. 37) dan Hartati desain penelitian deskriptif menjawab pertanyaan tentang orang, waktu, isi, lokasi dan metode yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada keadaan saat ini dengan mencoba melakukan langkah-langkah pengumpulan, pengklasifikasian dan penganalisaan data serta mendeskripsikan keadaan secara obyektif, sehingga dapat mendeskripsikan atau mendeskripsikan fenomena fenomena alam yang ada dan rekayasa buatan manusia. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang kebijakan dasar politik luar negeri Indonesia, pelaksanaan dan hasil visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam pilar diplomasi maritim serta tantangan Indonesia dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019.

1.8.2 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa definisi konsep, yaitu :

a. Menurut K.J Holsti (dalam Suryadi, 2015, h. 5), kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai satu atau lebih kepentingan, visi dan harapan yang sama yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Sederhananya, kerja sama bisa dilakukan oleh dua atau lebih negara. Sederhananya, kerja sama bisa dilakukan oleh dua atau lebih negara. Kerjasama semacam ini dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral atau kerjasama antara kedua negara, kemudian ada kerjasama regional atau kerjasama antar negara tetangga, dan ada juga kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang lebih rumit karena banyak negara. terlibat.

b. Politik Luar Negeri menurut Modelski (dalam Bakry, 1999, h. 125) itu adalah sistem aktivitas di mana suatu negara mengubah perilaku negara lain dan mengatur aktivitasnya sendiri dalam lingkungan internasional. Oleh karena itu, berbeda dengan politik internasional, fokus politik luar negeri hanya pada negara yaitu tindakan, sikap dan kebijakannya terhadap lingkungan internasional.

c. Kepentingan nasional (*National Interest*). Ada beberapa definisi kepentingan nasional yang dikemukakan oleh para pakar hubungan internasional H. J Morgenthau misalnya mempersamakan kepentingan nasional dengan *power* yang ingin dicapai suatu negera dalam hubungan internasional. Dengan kata lain, hakekat kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan). Namun Joseph Frankel dan Nicholas Spykman memiliki pandangan serupa kepentingan nasional tidak hanya unsur *power* tetapi juga mencakup pula kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan

sebagainya meskipun unsur power yang cukup tetap diperlukan guna mencapainya (Bakry, 1999, p. 61).

1.8.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Era pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019 dalam Visi Poros Maritim Dunia	Kerja Sama Bilateral	*Plan of Action on Maritime Cooperation, Indonesia dan Australia*	Kerja sama dalam bidang pendidikan, perdagangan, pariwisata dan penanggulangan terorisme
		Japan and Indonesia Maritime Partnership	Kerja sama dalam bentuk latihan operasi maritim bersama tersebut meliputi komunikasi laut, eksekusi penanganan kejahatan penyeludupan narkoba dan SAR (*Search and Rescue*)
		Kerja Sama Maritim Indonesia dan Tiongkok	Pengembangan Ilmu Pengertahuan dan Teknologi (IPTEK) kelautan, peningkatan wisatawan asal China, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan galangan kapal, dan kerjasama di bidang perikanan

	Kerja Sama Multilateral	*Indian Ocean Rim Association* (IORA)	Meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, memajukan pengembangan pengelolaan serta perikanan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab
		Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMPI)	Program kerja sama dilakukan dengan melaksanakan patroli terkoordinasi bersama meliputi *Port Visit Trilateral Maritime Patrol Indomalphi, Maritime Command Center (MCC), Sea Lane Corridor (SLC).*
		International Coral Reef Initiative (ICRI)	Memperkuat kerja sama dalam perlindungan serta pengelolaan terumbu karang, dan mencegah dampak perubahan iklim dengan membantu ketahanan terumbu karang
Tantangan Visi Poros Maritim Dunia	Tantangan Internal Visi Poros Maritim Dunia	Tantangan Manajerial / Kelembagaan	Tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga pemerintah yang terkait khususnya di bidang kemaritiman

		Tantangan Operasional	Adanya perompakan atau pembajakan bersenjata di laut perairan Indonesia menjadi penghambat terwujudnya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia
	Tantangan Eksternal Visi Poros Maritim Dunia	Respon negatif terhadap kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal dari negara tetangga seperti: - Vietnam - Filipina - Thailand - Malaysia	- Negara Vienam menunjukkan sikap keras dengan memberikan Nota Diplomatik berisi seruan pembebasan penangkapan nelayan mereka - Negara Filipina mengeluarkan Nota Diplomatik untuk mempersoalkan penenggelaman kapal dan penangkapan nelayan mereka - Negara Thailand tidak ingin nelayannya disalahkan atas dugaan aktivitas *illegal fishing* - Negara Malaysia mengaku keberatan atas kebijakan penenggelaman kapal karena dinilai melanggar kesepakatan kedua negara yaitu

			memulangkan nelayan yang telah tertangkap melanggar wilayah perairan masing-masing

1.8.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang terkait dengan fokus atau komponen peneliti. Unit analisis pada penelitian bisa berupa individu, organisasi atau lembaga, kelompok, benda serta waktu sesuai dengan fokus penelitiannya (Suprayogo, 2001, p. 48). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Politik Luar Negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo.Penetapan unit analisis ini karena penulis ingin menganalisis politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019 dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada tugas akhir ini adalah data-data yang berbentuk kata-kata atau kalimat verbal. Data kualitatif dapat diperoleh dengan metode studi kepustakaan dari bermacam-macam referensi dan hasil olahan dari beragam literatur atau pustaka yang terkait. Data tersebut akan dianalisiskan untuk menjawab persoalan masalah dalam penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak dan media perantara yang penulis dapat dari berbagai sumber, yaitu :

a. Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya.
b. Ruang Baca FISIP Universitas Sriwijaya.
c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
d. Media Cetak dan Surat Kabar serta Media Internet.
e. Media Sosial via *WhatsApp* dan Wawancara via telpon dengan Des Alwi yang merupakan Mantan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Roma Tahun 2015-2017.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Supranto (2003, h. 13) metode pengumpulan data dan informasi untuk memperoleh data-data yang objektif, relevan dan lengkap adalah sebagai berikut :

a. Metode Kepustakaan (*Library research*)

Metode kepustakaan yaitu sesuatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca semua buku referensi dan literatur yang berhubungan dengan induk dan permasalahan yang penulis amati guna mendapatkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai peralatan analisa data yang tersedia.

b. Metode Dokumentasi

Menurut Kartini Kartono (dalam Bungin, 2011, h. 154), metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial dan intinya adalah metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk

menelusuri data historis. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berupa gambar dan dokumen lainnya. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif guna menunjang penelitian. Penulis menggunakan dokumentasi dalam hal ini yang berkaitan melalui koran, jurnal, majalah, artikel dan data-data dari internet.

1.8.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber data. Triangulasi adalah metode yang digunakan peneliti kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dalam penelitian.Ada 5 jenis triangulasi yang dikemukakan oleh Lisa A. Guion (dalam Bachri, 2010), yaitu *data triangulation, investigator triangulation, theory triangulation, methodological triangulation, and environmental triangulation.* Pada penelitian kali ini yang akan digunakan adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara pencocokan data dengan sumber sah lainnya. Peneliti melakukan pencocokan kesimpulan pada setiap indikator dengan data dari dokumen serta teori yang telah teruji validitasnya.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Rijali, 2018) terdapat tiga tahap dalam analisis data, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data bisa berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting serta memilih data yang terkait dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang sudah ada, kemudian data tersebut dipilih dan dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya data yang cocok akan disederhanakan dengan maksud

mengklasifikasi data atas dasar tema-tema. Data yang tersebar akan dipadukan dan peneliti akan menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data sendiri merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang sudah terkumpul kemudian disusun sehingga dapat memperoleh kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan ataupun pengambilan langkah serta tindakan selanjutnya.Penyajian data melalui berbagai tahapan mulai dari pengumpulan semua data hingga menganalisis. Penyajian data dalam penelitian ini akan terdiri dari teks naratif, ataupun tabel, maupun bagan yang disusun berdasarkan gabungan data-data yang disusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan data-data penelitian dengan hipotesis termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan data-data penelitian berbeda dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan apa saja yang didapatkan dari data yang tersedia sesuai dengan kerangka teori.

1.8.9 Jadwal Penelitian

Adapun rancangan penelitian pada tugas akhir (Skripsi) ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 jadwal penelitian

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
	Des	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Ags**	**Sep**
Persiapan										
a. Pengajuan Judul	X									
b. Persiapan Judul	X									
c. Persetujuan Bimbingan	X									
Pelaksanaan										
a. Bimbingan Bab I		X	X							
b. Seminar Proposal				X						
c. Revisi Proposal				X	X	X				
d. Pengumpulan Data						X	X			
Pengolahan Data										
a. Bimbingan Bab II							X	X	X	
b. Bimbingan Bab III							X	X	X	
c. Bimbingan Bab IV							X	X	X	
Sidang										
a. Pendaftaran										X
b. Penyerahan Draft Skripsi										X
c. Persiapan Sidang										X
d. Sidang Skripsi										X

DAFTAR PUSTAKA

Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, *6*(2). https://doi.org/10.18196/hi.62112

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, *10*, 46–62.

Bakry, U. S. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional*. Jayabaya University Press.

Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Pertama). Prenada Media Group.

Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif* (Kedua). Kencana.

Indrawati, A. Y. N. (2016). *PENERAPAN PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MELALUI DIPLOMASI MARITIM*. *Politik Luar Negeri Indonesia*, 14–26.

Kebijakan Kelautan Indonesia, (2017).

Kominfo. (2016). *Menuju Poros Maritim Dunia*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata#:text=poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan,untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia

Maiwan, M. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *17*(1), 99–120. https://doi.org/10.21009/jimd.v17i1.8764

Martini, R. (2015). *PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP TERHADAP PROFIL KABINET KERJA JOKOWI Rina Martini*. *1*(2), 34–44.

Nurdin dan Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah.

Pramono, S. (2016). *Diplomasi Poros Maritim : Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri* (F. C. Kepala Pusat P2K-OI (ed.)). Badan pengkajian dan Perkembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Rijal, N. K. (n.d.). *Smart Maritime Diplomacy : Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. 63–78.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, *17*(33), 81–95.

Siliwangi Raden, M. (2015). Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Berlandaskan Kepentingan Nasional dan Jati Diri Sebagai Negara Maritim. In *Background Study penyusunan RPJMN III 2015-2019*. Kementerian PPN / Bappenas.

Soleman, M., & Noer, M. (2017). Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015 [Nawacita: Superior Strategy of Jokowi in October 2014 - 20 October 2015]. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, *13*(1), 1961–1975.

Supranto, J. (2003). *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. Rineka Cipta.

Suprayogo, I. dan T. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Supriyadi, H. (2018). Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *6*(2). https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1136

Suryadi, A. (2015). KEPENTINGAN INDONESIA MENYEPAKATI KERJASAMA EKONOMI DENGAN SLOVAKIA DALAM BIDANG ENERGI DAN INFRASTRUKTUR. *JOM FISIP*, *2*(5). https://media.neliti.com/media/publications/32801-ID-kepentingan-indonesia-menyepakati-kerjasama-ekonomi-dengan-slovakia-dalam-bidang.pdf